



PUTUSAN

Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Pengguat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1994

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxx, Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : xxx/xxx/VI/1994;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama di alamat, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya
suami istri dikaruniai 4 anak yang bernama :

a. Anak Penggugat dan Tergugat (P) umur 21 tahun;

b. Anak Penggugat dan Tergugat (P) umur 17 tahun;

c. Anak Penggugat dan Tergugat (L) umur 15 tahun;

d. Anak Penggugat dan Tergugat (L) umur 14 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2003,
rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut: -----

a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan
bathin; -----

b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin
komunikasi yang baik; --

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2007, antara Penggugat

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan
sebagaimana layakanya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk
dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan
untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan
perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa
Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila
gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut
dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang
maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama xxxx Kota
Tangerang untuk dicatat perceraianya; -----

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh
biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon
dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya
memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Tergugat) terhadap Penggugat
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Khumairoh) Nomor 36710xxxxxxxxx, tanggal 7 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xxx/VI/1994, tanggal 26 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Cipondok Tangerang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2003, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena kedua belah sering berbeda faham dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa puncaknya tahun 2007, mereka telah pisah rumah; -----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



2. Nama Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Cipondok Tangerang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2003, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena kedua belah sering berbeda faham dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa puncaknya tahun 2007, mereka telah pisah rumah; -----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; ---

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تَنْبِيْهٌ مِّلْعٌ تَنَاكُنْ إِنْ زَاجٌ بَاغِلًا يَلْعُءُ أَضْقَالًا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنيلاب متابذا زاج قبيغ وأراوتو ززعتب ززعتب نأف

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat serta kurang memperdulikan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah serta kurang memperdulikan Penggugat, puncaknya sejak tahun 2007 Penggugat dan

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tergugat pisah rumah dan sejak itu sudah tidak saling komunikasi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	590.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	681.000,-

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)